

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi dan hiperkonektivitas (*hyperconnectivity*) saat ini, komunikasi memainkan peran yang semakin penting dan krusial dalam membentuk narasi, jejaring sosial, dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi sosial dan pertukaran informasi secara signifikan, menciptakan ruang-ruang baru bagi diskursus publik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional (Castells, 2010). Dalam konteks ini, intelijen negara sebagai garda terdepan bangsa memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus mengidentifikasi dan merespons potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, intelijen negara memerlukan metode baru yang tepat untuk lebih memahami cara narasi, jejaring sosial, dan diskursus yang berkembang dalam masyarakat. Diskursus tersebut berpotensi bergeser dari bentuk komunikasi publik alami menjadi komunikasi diskursif yang manifest, yang dapat memengaruhi masyarakat dan pada akhirnya, menjadi ancaman bagi keamanan negara. Secara teoretis, praktik diskursif yang berkembang dalam masyarakat memang berpotensi menjadi diskursus ancaman yang bersifat laten namun dapat dikenali dengan baik melalui penanda-penanda diskursus yang

dikonfigurasi melalui berbagai kanal komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Fairclough, 2013).

Mengenali praktik diskursif ancaman tersebut dapat membantu intelijen negara untuk memberikan respons yang tepat sebagai aplikasi berharga ilmu komunikasi dengan menggunakan Analisis Diskursus Kritis (*Critical discourse analysis*). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial termanifestasi dalam praktik-praktik komunikasi yang ada di masyarakat (van Dijk, 2015).

Dalam konteks ini, Operasi Teritorial yang dijalankan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan serangkaian operasi yang diimplementasikan oleh satuan militer yang bertugas di barisan terdepan dalam melakukan analisis terhadap berbagai ancaman terhadap negara dan menyusun strategi kebijakan. Operasi ini merupakan analisis, saran, dan rekomendasi sebagai produk intelijen yang kemudian akan disampaikan kepada presiden atau institusi internasional yang membutuhkan. Operasi ini dirancang dengan target, jadwal, lokasi, dan dukungan logistik yang spesifik, yang telah dipersiapkan melalui perencanaan yang terperinci.

Tujuan dari operasi tersebut adalah untuk menyelesaikan misi tertentu yang ditugaskan berdasarkan instruksi dari komando pusat yang berhak dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kewibawaan dan otoritas pemerintah. Dengan demikian, Analisis Diskursus Kritis dapat

menjadi metode penting bagi intelijen negara dalam menguraikan struktur kekuatan di balik diskursus publik yang membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis diskursus yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Pada dasarnya, sejalan dengan analisis yang diterapkan dalam pendekatan analisis diskursus kritis, aktivitas yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara berupa proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis dan integrasi adalah aktivitas komunikasi yang melibatkan elemen-elemen penting dalam proses komunikasi yang merupakan fokus utama dari ilmu komunikasi yakni komunikator, saluran, pesan, komunikasi dan efek (Lasswell, 1948). Kelima elemen penting tersebut dapat dijadikan sebagai unit analisis untuk memahami secara kritis aktivitas yang dilakukan oleh BIN untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan ancaman terhadap negara.

Berdasarkan atas pemahaman ini, potensi ancaman yang bersifat laten atau yang sulit diobservasi secara langsung dapat diidentifikasi lebih awal dengan memahami dengan baik konfigurasi diskursus dominan berkaitan dengan potensi ancaman tersebut yang dapat dikenali melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Hal ini sejalan dengan konsep "*early warning system*" dalam intelijen yang menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi ancaman (Grabo, 2004).

Seperti disebutkan di awal, identifikasi terhadap diskursus dominan yang berkembang dalam masyarakat memiliki relevansi dalam konteks operasi intelijen, mengingat definisi diskursus yang dirumuskan oleh

Foucault (2019). Diskursus, menurut Foucault, dihasilkan melalui efek-efek kekuasaan yang beroperasi dalam struktur sosial, di mana kekuasaan tersebut menetapkan norma, aturan, dan kategori-kategori tertentu yang diterima dan diinternalisasi oleh elemen-elemen dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Proses ini, pada gilirannya, mempengaruhi dan mengarahkan tindakan masyarakat dalam kerangka diskursif.

Pemahaman mendalam tentang diskursus dominan yang berkembang di masyarakat melalui kanal-kanal komunikasi dalam bentuk diskursif ancaman memungkinkan operasi intelijen untuk tidak hanya mengenali tetapi juga memprediksi perilaku dan motivasi kelompok-kelompok tertentu, yang nantinya dapat memfasilitasi pengembangan strategi yang lebih efektif dan tepat dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap keamanan negara (Clegg, 2009; Foucault, 2019).

Konsep diskursus, sebagaimana digagaskan oleh Foucault, yang mengaitkan secara mendalam antara kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas, secara teoretis dapat memberikan pemahaman terhadap operasi intelijen negara. Foucault memandang diskursus sebagai sistem berpikir dan berkomunikasi yang membentuk persepsi kita terhadap dunia dan diri kita, yang secara signifikan mempengaruhi konstitusi praktik dan institusi sosial. Dalam konteks intelijen negara, diskursus yang berkembang dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai penanda (*discourse marker*) atau indikator untuk mengenali entitas yang mengancam kedaulatan negara dan berupaya memperkuat serta memperluas pengaruhnya. Ini

tidak terbatas pada penggunaan propaganda atau penyebaran ideologi saja, tetapi juga meliputi praktik-praktik terselubung (*latent*) yang terorganisir dengan baik.

Foucault menyoroti relasi simbiosis antara kekuasaan dan pengetahuan, dalam konteks intelijen negara dapat dianggap sebagai instrumen vital dalam memahami akumulasi pengetahuan tentang dan oleh individu dan kelompok tertentu, yang nantinya vital untuk mengungkap dan memahami strategi dari diskursif kolektivitas (*discursive collectivity*) yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Dalam konteks ini, operasi intelijen tidak hanya mengakumulasi data, melainkan juga fokus pada interpretasi dan aplikasi informasi untuk mendeteksi dan mengerti indikator ancaman melalui konfigurasi diskursus yang terbentuk di masyarakat. Analisis diskursus, dalam hal ini, menjadi kunci untuk memahami dan memetakan konfigurasi ancaman, dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada untuk mengidentifikasi pola-pola diskursus yang dominan dan pengaruhnya terhadap dinamika sosial.

Untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian sebelumnya, berdasarkan atas kajian kepustakaan yang dilakukan, belum ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang Komunikasi Intelijen dengan mengaplikasikan Analisis Diskursus Kritis yang berfokus pada diskursus ancaman kepada negara (*discursive infiltration*). Sungguh pun Analisis Diskursus Kritis (CDA) secara epistemologi fokus pada diskursus ketidakadilan, ketidakseimbangan dan tidak setaraan, (*injustice*,

*imbalanced and unemansipatory discourses*) serta relasi kuasa (*power relations*) dan dominasi (*domination*), untuk dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, penelitian ini akan berfokus pada diskursus ancaman negara dengan memberikan penekanan penting pada potensi gerakan yang terepresentasi melalui praktik diskursif yang berkembang secara manifest di masyarakat yang dapat diamati melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia.

Dalam konteks ini pendekatan analisis diskursus krisis menjadi sangat relevan. Diskursus krisis tidak hanya memfokuskan pada bahasa dan teks, tetapi juga pada relasi kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial yang terepresentasi dan terkonstruksi dalam formasi diskursus (Foucault, 2019). Dengan mengintegrasikan analisis intelijen ke dalam pendekatan Diskursus Kritis, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah kerangka konseptual yang memungkinkan model baru dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi ancaman terhadap negara untuk dapat memberikan respons terhadap potensi ancaman dengan cara yang lebih proaktif.

Intelijen berfungsi sebagai salah satu instrumen vital dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Ia merupakan hasil dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi informasi yang berkaitan dengan isu-isu keamanan. Dengan kata lain, intelijen adalah inti dari pengetahuan yang berusaha membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis informasi terkini, serta menyediakan

data bagi pengambil keputusan terkait proyeksi latar belakang dan alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kebijakan dan tindakan yang akan diambil. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan strategi untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang mengancam keamanan negara (Alexandra, 2006: 17).

Pada dasarnya, intelijen bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Intelijen berfungsi sebagai alat bagi negara dalam meraih tujuan tertentu demi kepentingan nasional dan keamanan nasional, dengan proses intelijen menjadi langkah awal menuju tujuan akhir. Melalui deteksi dini yang dilakukan dengan konfigurasi diskursif terhadap ancaman, intelijen berusaha untuk mencari dan mengolah informasi yang kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan penegakan hukum setelah menerima hasil dari analisis intelijen. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui intelijen sering kali mencakup memenangkan perang, meredam kegiatan radikalisme dan terorisme, atau mengungguli hal-hal yang dianggap sebagai ancaman atau lawan. Selain itu, intelijen juga dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial, karena berusaha menganalisis dan memprediksi perilaku politik, ekonomi, dan sosial secara makro.

Studi intelijen negara fokus pada mekanisme dan strategi pengumpulan informasi, melakukan analisis mendalam terhadap potensi ancaman, dan merumuskan respons yang tepat terhadap situasi tersebut.

Di sisi lain, studi komunikasi, khususnya melalui pendekatan *Critical discourse analysis* (CDA), mengevaluasi diskursus yang berlangsung di masyarakat. Pendekatan ini mengeksplorasi berbagai level analisis, khususnya bagaimana diskursus dominan terbentuk oleh dan sekaligus membentuk formasi tematik suatu diskursus, relasi kekuasaan, dan kerangka ideologi yang ada menggunakan berbagai kanal komunikasi. Integrasi antara kedua pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi "*discourse marker*" untuk mendeteksi potensi ancaman. Selain itu, pendekatan penelitian ini juga membantu mengidentifikasi formasi tematik melalui praktik diskursif baik manifes maupun laten (*manifest and latent discourse*) yang berkaitan dengan isu-isu ancaman terhadap negara melalui analisis diskursus dominan dan berbagai ideologi yang mempengaruhi konfigurasi dan formasi diskursus yang berkembang di masyarakat melalui.

Dalam melaksanakan tugas-tugas intelijen di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN), kegiatan operasional intelijen dikategorikan ke dalam tiga bentuk yang juga berlaku secara universal, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saronto dan Karwita, 2001). Kegiatan operasional Intelkam bertujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan objek atau aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas lain dari BIN. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup.

Penelitian ini diusulkan dalam latar belakang meningkatnya tantangan global, seperti disinformasi, radikalisasi, dan potensi konflik yang ditimbulkan oleh perubahan sosial-politik yang cepat. Mengingat pentingnya mengantisipasi dan merespons ancaman dalam tahap awal, integrasi antara analisis intelijen dan diskursus krisis mempersembahkan sebuah pendekatan inovatif yang dapat mendukung kebijakan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Urgensi pendekatan inovatif ini semakin nyata ketika melihat berbagai kasus yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus Bom Makassar 2021 menjadi bukti nyata bagaimana pelaku teror terpapar ideologi ekstrem melalui konten online, yang kemudian berujung pada aksi teror yang memakan korban. Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) juga terbukti telah memanfaatkan platform digital untuk koordinasi dan penyebaran ideologi mereka secara terselubung.

Fenomena radikalisasi digital juga terlihat dari munculnya berbagai aliran keagamaan yang menyimpang. Kasus-kasus seperti Gafatar (2016), Keraton Agung Sejagat (2020), dan fenomena "Kerajaan Ubur-Ubur" (2021) menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran ajaran-ajaran yang meresahkan masyarakat. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah target utama radikalisasi digital ini adalah generasi muda, seperti terlihat dari kasus-kasus remaja yang terpapar ideologi ISIS melalui media sosial atau rekrutmen mahasiswa ke dalam kelompok radikal melalui YouTube.

Ancaman terhadap kedaulatan negara juga telah bertransformasi ke ruang digital. Propaganda gerakan separatis seperti OPM dan RMS kini aktif disebarakan melalui media sosial dan YouTube. Situasi ini diperparah dengan maraknya disinformasi dan hoaks yang berpotensi memicu konflik, seperti yang terjadi dalam kasus hoaks Papua 2019 yang memicu kerusuhan. Echo chamber di media sosial semakin memperkuat polarisasi dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Kompleksitas ancaman digital ini semakin rumit dengan munculnya modus-modus baru seperti penggunaan cryptocurrency untuk pendanaan terorisme, pemanfaatan VPN dan dark web untuk aktivitas ilegal, serta koordinasi aksi massa melalui aplikasi pesan terenkripsi. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional telah mengalami transformasi fundamental yang membutuhkan pendekatan baru dalam operasi intelijen teritorial.

Munculnya berbagai aksi teror dan kerusuhan massa di sejumlah daerah di Indonesia, yang berpotensi menyebabkan disintegrasi dan mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengakibatkan institusi intelijen menjadi sorotan dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Jajaran intelijen dianggap tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai aksi teror dan kerusuhan tersebut. Mengingat kejadiannya berlingkup nasional maka baik secara langsung maupun tidak langsung, sorotan dan kritikan tersebut ditujukan kepada pengemban tugas intelijen tingkat nasional. BIN sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah

pengemban tugas intelijen nasional. Di samping itu, BIN berperan pula menyelenggarakan. Oleh karena itu, adalah wajar apabila BIN menjadi sasaran kritik atas kinerja intelijen. Meskipun sebenarnya kesalahan dan kekurangan intelijen selama ini tidak bisa ditimpakan semua kepada BIN.

Kinerja intelijen dinilai buruk dan lemah sebagai akibat dari kurangnya penggalangan. Karenanya, sudah saatnya dilakukan pembenahan-pembenahan. Intelijen juga dinilai sudah menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya yakni mengabdikan diri untuk kepentingan negara. Intelijen dituntut agar tidak mengabdikan diri kepada kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Moral aparat intelijen juga dianggap sudah lemah, tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa melainkan kepentingan kelompok. Lemahnya moral aparat intelijen, juga dinilai karena terkontaminasi rezim Orde Baru. Jaringan intelijen juga masih dikuasai orang-orang lama yakni orang Orde Baru.

Meskipun peran intelijen dianggap lemah dan terpuruk, namun sebenarnya aparat intelijen dengan kemampuan dan kewenangan yang ada sudah banyak berbuat, serta berusaha mengantisipasi dan mengambil tindakan serta langkah-langkah secukupnya. Namun ternyata pihak-pihak lawan lebih lihai, sehingga terkesan intelijen selalu terlambat. Sebagai akibatnya, ada yang menaruh kecurigaan terhadap intelijen, yang dianggapnya ikut bermain atau sengaja membiarkan kerusuhan terus terjadi, serta enggan menyelesaikan tugas-tugas negara yang dibebankan.

Sebenarnya intelijen mampu mendeteksi dan menyelesaikan berbagai bentuk kerusakan, khususnya intelijen preventif, yang bisa mendeteksi setiap gejala kerusakan yang bakal terjadi. Bilamana ada tindakan preventif dari aparat intelijen, kemungkinan terjadinya kerusakan sudah bisa diantisipasi sedini mungkin dan korban tidak perlu banyak berjatuhan.

Namun, dalam menjalankan koordinasinya, BIN menghadapi berbagai kendala yang menjadi masalah tersendiri bagi negara dalam meningkatkan kinerja intelijen Indonesia. Koordinasi yang dilakukan melibatkan banyak lembaga intelijen, sehingga menyatukan semua lembaga tersebut untuk mencapai satu tujuan demi keamanan nasional menjadi tantangan yang tidak mudah, mengingat masing-masing lembaga memiliki kekuatan dan otoritasnya sendiri. Proses koordinasi memerlukan partisipasi aktif dari setiap lembaga intelijen untuk saling berkolaborasi. Dalam konteks ini, BIN perlu melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap hambatan yang mungkin muncul dalam berkoordinasi dengan lembaga intelijen lainnya.

Intelijen terkait erat dengan proses penginderaan awal, yang dikenal sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*). Kegiatan intelijen merupakan komponen esensial dari sistem ini, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk memiliki kewaspadaan awal (*fore knowledge*). Tugas umum intelijen mencakup pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang

optimal demi mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, beberapa tugas khusus badan intelijen meliputi:

1. Menyediakan analisis di bidang-bidang yang berkaitan dengan keamanan nasional.
2. Memberikan peringatan dini terkait potensi krisis yang dapat mengancam.
3. Mendukung manajemen krisis di tingkat nasional dan internasional dengan mendeteksi niat dari pihak lawan atau individu yang berpotensi menjadi lawan.
4. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan keamanan nasional.
5. Melindungi data dan informasi yang bersifat rahasia.
6. Melaksanakan operasi kontra-intelijen (ISDPS: 2008).

Untuk lebih memahami peran dan fungsi intelijen dalam konteks keamanan nasional, berikut disajikan tabel yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi intelijen:

**Tabel 1.1.** Tugas Pokok dan Fungsi Intelijen

No	Tugas Pokok	Fungsi
1	Pengumpulan Informasi	Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan keamanan nasional
2	Analisis	Menganalisis informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi potensi ancaman
3	Peringatan Dini	Memberikan peringatan dini terhadap ancaman yang teridentifikasi
4	Operasi Kontra-Intelijen	Melakukan operasi untuk menangkal aktivitas intelijen terhadap pihak lawan

5	Perlindungan Informasi	Melindungi informasi rahasia negara dari pihak yang tidak berwenang
---	------------------------	---

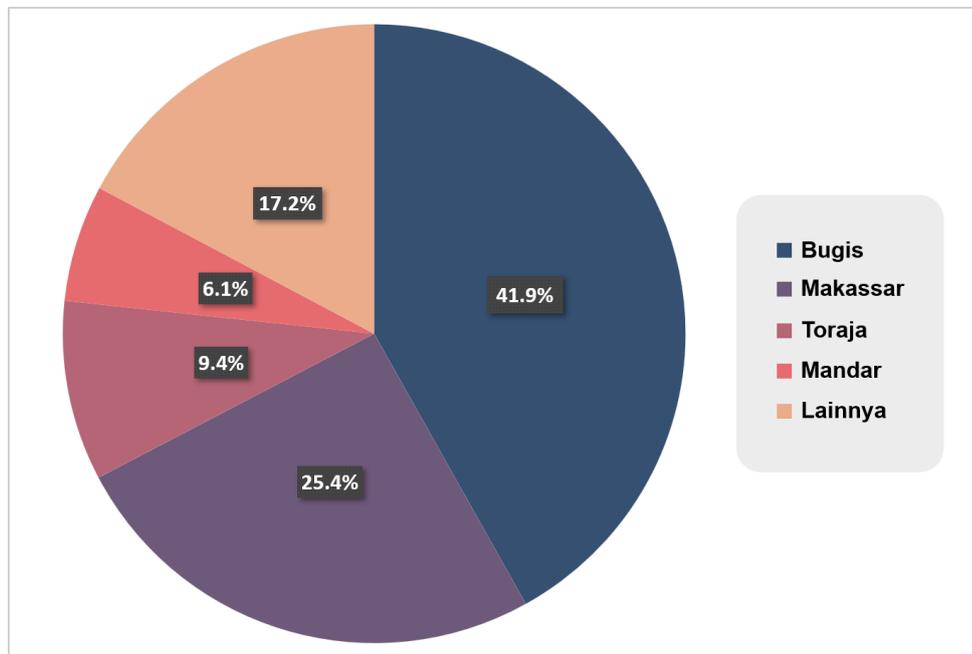
Penelitian tentang strategi komunikasi intelijen salah satunya dilakukan oleh Gusti Bagus Eka Prasetia (2019) dengan judul "Komunikasi Intelijen Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat" dimana Strategi Komunikasi Intelijen dalam melakukan deteksi dini terhadap ambang gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menggunakan metode spionase untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.
2. Mencari sebanyak mungkin sumber informasi.
3. Mengumpulkan informasi pembandingan untuk mendapatkan fakta yang akurat mengenai peristiwa yang terjadi.
4. Mencari informan tambahan untuk menjalin kerjasama.
5. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada intelijen.

Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa komunikasi intelijen memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Intelijen harus mampu membangun jaringan informasi yang luas dan dapat diandalkan, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memverifikasi informasi yang diperoleh.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, implementasi operasi teritorial menghadapi tantangan yang unik. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi, serta

memiliki sejarah panjang gerakan separatis dan konflik sosial. Berikut adalah grafik yang menggambarkan keragaman etnis di Sulawesi Selatan:



**Gambar 1.** Etnis di Sulawesi Selatan,

Sumber: Badan pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Keragaman etnis ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi operasi teritorial intelijen. Di satu sisi, keragaman ini dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan sosial yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keragaman ini juga dapat menjadi sumber informasi yang kaya bagi intelijen dalam memahami dinamika sosial-politik di wilayah tersebut.

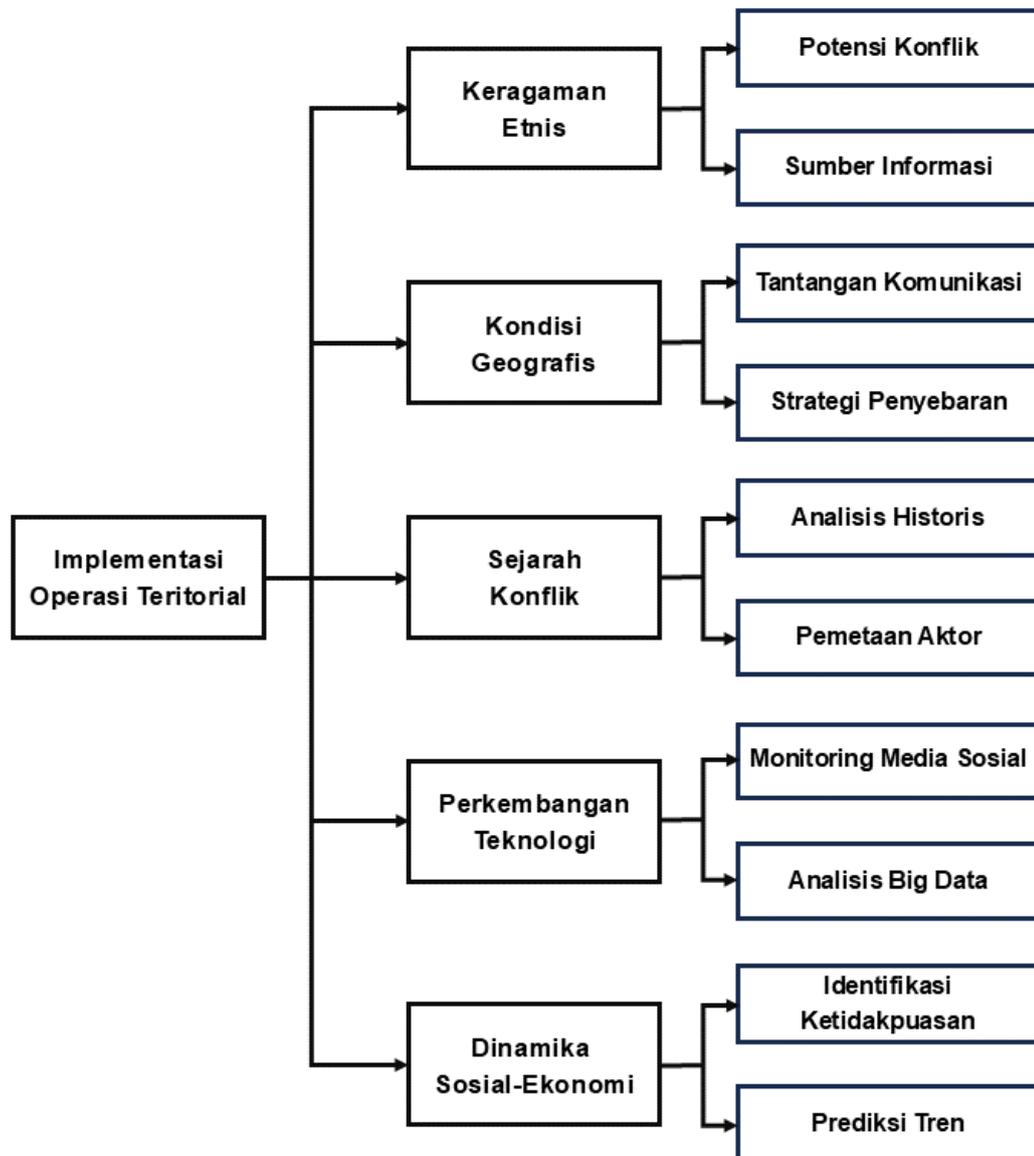
Implementasi operasi teritorial di Sulawesi Selatan juga perlu mempertimbangkan faktor geografis. Provinsi ini memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan. Kondisi ini mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada strategi komunikasi intelijen yang perlu diterapkan.

Dalam konteks ini, pendekatan Analisis Diskursus Kritis menjadi sangat relevan. Pendekatan ini memungkinkan intelijen untuk memahami tidak hanya apa yang dikatakan atau dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi diskursus tersebut. Dengan demikian, intelijen dapat mengidentifikasi potensi ancaman dengan lebih akurat dan komprehensif.

Sebagai contoh, dalam menganalisis diskursus separatisme di Sulawesi Selatan, intelijen perlu memahami tidak hanya narasi-narasi yang muncul di permukaan, tetapi juga struktur kekuasaan yang ada, sejarah konflik di wilayah tersebut, serta dinamika sosial-ekonomi yang mungkin menjadi pemicu ketidakpuasan masyarakat. Analisis Diskursus Kritis memungkinkan intelijen untuk melihat keterkaitan antara berbagai faktor ini dan bagaimana mereka membentuk diskursus yang berkembang di masyarakat.

Implementasi operasi teritorial di Sulawesi Selatan juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dan platform komunikasi digital lainnya telah menjadi sarana baru bagi penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Intelijen perlu mengadaptasi strategi komunikasinya untuk dapat memantau dan menganalisis diskursus yang berkembang di ruang digital ini.

Berikut adalah diagram yang menggambarkan kompleksitas faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi operasi teritorial di Sulawesi Selatan:



**Gambar 2.** Faktor-faktor dalam Implementasi Operasi Teritorial,  
Sumber: Olahan Peneliti Sendiri

Diagram ini menunjukkan bahwa implementasi operasi teritorial di Sulawesi Selatan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait. Keragaman etnis, kondisi geografis, sejarah konflik, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi semua berkontribusi pada kompleksitas situasi yang dihadapi oleh intelijen.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, pendekatan Analisis Diskursus Kritis menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis diskursus yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan intelijen untuk:

1. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang berperan dalam pembentukan diskursus
2. Memahami konteks historis dan sosial-budaya yang melatarbelakangi diskursus
3. Menganalisis struktur kekuasaan yang memengaruhi produksi dan reproduksi diskursus
4. Mengidentifikasi ideologi-ideologi yang tersembunyi di balik diskursus yang tampak di permukaan
5. Memetakan relasi antara diskursus dan praktik sosial yang mungkin mengancam keamanan nasional

Dengan mengintegrasikan pendekatan Analisis Diskursus Kritis ke dalam operasi teritorial, intelijen dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terhadap keamanan nasional. Pendekatan ini memungkinkan intelijen untuk tidak hanya fokus pada gejala-gejala permukaan, tetapi juga memahami akar permasalahan yang mungkin menjadi sumber ancaman di masa depan.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, implementasi pendekatan ini dapat membantu intelijen dalam:

1. Memahami dinamika antar-etnis dan potensi konflik yang mungkin timbul
2. Mengidentifikasi narasi-narasi separatisme atau radikalisme yang mungkin berkembang di masyarakat
3. Menganalisis dampak kesenjangan ekonomi terhadap stabilitas sosial-politik
4. Memantau penyebaran ideologi ekstremis melalui media sosial dan platform digital lainnya
5. Mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul akibat persaingan sumber daya alam

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi intelijen, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi implementasi operasi teritorial di Sulawesi Selatan. Melalui integrasi pendekatan Analisis Diskursus Kritis ke dalam praktik intelijen, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi teritorial dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman terhadap keamanan nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan ideologi yang mengancam keamanan negara berkembang di masyarakat melalui kanal-kanal komunikasi di Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Bagaimana konstruksi diskursus dominan yang teridentifikasi dapat berpotensi mengancam keamanan negara dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana konfigurasi diskursif ancaman terhadap negara yang menggambarkan gerakan terorganisir yang berpotensi mengancam negara di Provinsi Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa dan bagaimana pengetahuan dan ideologi yang mengancam keamanan negara berkembang di masyarakat melalui kanal-kanal komunikasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi diskursus dominan yang teridentifikasi dapat berpotensi mengancam keamanan negara dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menginvestigasi konfigurasi diskursif ancaman terhadap negara yang menggambarkan gerakan terorganisir yang berpotensi mengancam negara di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memfokuskan penelitian pada aspek komunikasi intelijen dalam konteks operasi teritorial di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi keamanan nasional serta pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks ancaman bangsa dan negara di wilayah teritorial Sulawesi Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

1. Menemukan model dan metode yang tepat dan efektif dalam mengidentifikasi ancaman negara secara dini menggunakan identifikasi konfigurasi diskursif ancaman melalui penelitian yang komprehensif.
2. Berkontribusi secara teoretis dan metodologis terhadap pengembangan ilmu komunikasi khususnya pada kajian komunikasi intelijen menggunakan pendekatan Analisis Diskursus Kritis.
3. Memperkaya literatur tentang integrasi antara studi intelijen dan analisis komunikasi, khususnya dalam konteks operasi teritorial.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan kontribusi pada praktik keamanan nasional, khususnya dalam konteks operasi teritorial dan komunikasi intelijen di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menyediakan kerangka kerja analitis yang dapat digunakan oleh praktisi intelijen dalam mengidentifikasi dan menganalisis ancaman keamanan nasional melalui analisis diskursus.
3. Membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi ancaman keamanan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.4.3 Manfaat Sosial**

1. Meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas isu keamanan nasional dan peran komunikasi dalam menghadapi ancaman tersebut.
2. Mendorong dialog yang lebih konstruktif antara aparaturnya keamanan dan masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Kontribusi Teoretis: Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami komunikasi intelijen dengan mengintegrasikan pendekatan Analisis Diskursus Kritis. Hal ini membuka jalan bagi pengembangan teori baru dalam studi komunikasi intelijen dan keamanan nasional.
2. Inovasi Metodologis: Penggunaan Analisis Diskursus Kritis dalam konteks operasi teritorial intelijen merupakan pendekatan yang relatif baru. Penelitian ini dapat menjadi model bagi studi-studi serupa di masa depan.
3. Relevansi Kontekstual: Dengan berfokus pada Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keamanan di salah satu wilayah strategis Indonesia. Hal ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi serupa di wilayah lain.
4. Implikasi Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi keamanan nasional yang lebih efektif dan kontekstual.

5. Peningkatan Kapasitas Intelijen: Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas intelijen dalam menganalisis dan merespons ancaman keamanan nasional melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

### 1.6 *Novelty* Penelitian

*Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integrasi Pendekatan Interdisiplin (*Interdisciplinary Approach*): Penelitian ini menggabungkan studi komunikasi intelijen dengan Analisis Diskursus Kritis, suatu pendekatan yang berupaya menemukan irisan (inter-section) antara dua disiplin ilmu yang diharapkan akan menjadi kontribusi bagus terhadap pengembangan komunikasi intelijen dari paradigma kritis dengan menggunakan CDA sebagai metode utama.
2. Fokus Geografis: Penelitian ini berfokus pada implementasi operasi teritorial di Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan perspektif yang unik tentang dinamika keamanan di wilayah tersebut.
3. Analisis Multi-dimensi: Penelitian ini tidak hanya melihat aspek komunikasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan historis dalam analisisnya.
4. Kontribusi Metodologis: Pengembangan kerangka analitis yang mengintegrasikan Analisis Diskursus Kritis ke dalam analisis yang dapat mendeteksi potensi ancaman dengan mengamati diskursus dominan yang berkembang di masyarakat, yang secara formatif dapat diketahui

melalui isu-isu yang dibicarakan dan didiskusikan melalui kanal-kanal utama yang dipergunakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur, tetapi juga menawarkan perspektif dan pendekatan baru dalam memahami dan menganalisis komunikasi intelijen dalam konteks operasi teritorial.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Konsep**

##### **2.1.1 Definisi Komunikasi Intelijen**

Komunikasi intelijen merujuk pada semua bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh lembaga atau institusi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi secara tertutup demi kepentingan dan keamanan institusi atau organisasi tersebut (Lowenthal, 2017). Studi mengenai komunikasi intelijen merupakan bidang yang terus berkembang dan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk pertahanan negara, relasi internasional, dan ilmu komunikasi.

Dari perspektif ilmu komunikasi, studi intelijen berfokus pada mekanisme kerja intelijen secara kelembagaan, seperti Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Caparini (2007), intelijen merupakan salah satu dari tiga lembaga utama yang menjalankan fungsi keamanan negara, selain militer dan kepolisian. Lembaga intelijen negara dibentuk untuk mengantisipasi ancaman mendadak dan mengadopsi pendekatan strategis melalui pengumpulan dan analisis informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan. Dengan pendekatan ini, kerja intelijen sangat bergantung pada informasi yang akurat dan relevan. Hal ini memungkinkan intelijen untuk merancang dan menerapkan kebijakan demi kepentingan nasional,

terutama dalam menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang aktual maupun potensial.

Proses komunikasi intelijen merupakan unsur pokok dalam kegiatan intelijen. Harold Lasswell, mengidentifikasi komponen-komponen dalam proses komunikasi intelijen yang meliputi serangkaian pertanyaan:

1. Apa (*what*) yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi
2. Siapa (*who*) yang melakukan atau mengatakan
3. Kapan (*when*) kejadian itu berlangsung atau akan terjadi
4. Di mana (*where*) tempat atau lokasi yang relevan
5. Bagaimana (*how*) cara melakukan dan berlangsungnya kejadian
6. Mengapa (*why*) motivasi di balik kejadian tersebut

Model komunikasi ini memiliki kemiripan dengan model komunikasi Lasswell yang terkenal: "*Who says what, to whom, in which channel, with what effect*" (Lasswell, 1948). Namun, dalam konteks intelijen, pertanyaan-pertanyaan ini lebih diarahkan pada pengumpulan dan analisis informasi untuk kepentingan keamanan nasional.

### **2.1.2 Peran Badan Intelijen Negara dan Komunikasi Organisasi Intelijen**

Tugas dan Fungsi BIN Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga intelijen utama Indonesia memiliki beberapa tugas dan fungsi pokok:

a. Fungsi Utama:

- Pengumpulan, analisis, dan diseminasi intelijen terkait ancaman keamanan nasional
- Pelaksanaan kegiatan kontra-intelijen
- Koordinasi intelijen antar lembaga
- Pemberian peringatan dini tentang ancaman terhadap keamanan nasional
- Pengamanan informasi dan aset-aset vital negara

b. Area Operasi:

- Kontra-terorisme
- Keamanan siber
- Pengawasan ancaman transnasional
- Manajemen krisis nasional
- Perlindungan infrastruktur kritis

Kerangka Hukum BIN beroperasi di bawah Undang-Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang memberikan landasan legal untuk:

- Pelaksanaan operasi intelijen
- Kewenangan dan batasan operasional
- Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas
- Koordinasi dengan lembaga lain

## Perbedaan dengan Lembaga Intelijen Lainnya

### a. Badan Intelijen Negara (BIN):

- Merupakan lembaga intelijen utama di tingkat nasional
- Bertanggung jawab langsung kepada Presiden
- Memiliki cakupan operasi yang luas mencakup semua aspek keamanan nasional
- Berfungsi sebagai koordinator intelijen nasional

### b. Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI:

- Fokus pada intelijen militer dan pertahanan
- Bertanggung jawab kepada Panglima TNI
- Berkonsentrasi pada ancaman terhadap kedaulatan militer
- Memiliki spesialisasi dalam intelijen pertahanan

### c. Intelijen Kepolisian:

- Fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri
- Bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian
- Berkonsentrasi pada investigasi kriminal dan gangguan keamanan
- Spesialisasi dalam pengumpulan bukti untuk penegakan hukum

Sistem koordinasi antar lembaga intelijen dilakukan melalui

beberapa mekanisme:

- Komunitas Intelijen Negara yang dikoordinasikan oleh BIN
- Forum koordinasi reguler antar lembaga
- Sistem pertukaran informasi terstruktur
- Operasi gabungan untuk ancaman spesifik

Dalam konteks modern, BIN dan lembaga intelijen lainnya menghadapi beberapa tantangan:

- Adaptasi terhadap ancaman digital dan siber
- Kebutuhan untuk menyeimbangkan keamanan dengan privasi
- Tuntutan transparansi dalam era demokratis
- Perlunya peningkatan kapasitas analisis big data
- Koordinasi yang lebih efektif antar lembaga

BIN dan lembaga intelijen Indonesia lainnya juga terlibat dalam kolaborasi internasional seperti:

- Pertukaran informasi dengan badan intelijen asing
- Kerjasama dalam menangani ancaman transnasional
- Pengembangan kapasitas bersama
- Forum intelijen regional dan internasional

Pemahaman tentang tugas, fungsi, dan perbedaan antar lembaga intelijen ini penting dalam konteks operasi teritorial karena memungkinkan:

- Koordinasi yang lebih efektif
- Pembagian tugas yang jelas
- Penghindaran tumpang tindih operasi
- Optimalisasi sumber daya dan kapabilitas

Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas ancaman kontemporer yang membutuhkan pendekatan terpadu dari berbagai lembaga intelijen dengan kapabilitas dan spesialisasi yang berbeda.

Organisasi intelijen dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan individu yang bekerja melalui struktur hierarki dan pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Daft, 2010).

Dalam organisasi intelijen, terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya kegiatan organisasi:

1. Terdapat hierarki jabatan atau kedudukan yang memungkinkan perbedaan posisi yang jelas antara individu dalam organisasi, seperti pimpinan, staf, dan anggota.
2. Ada pembagian tugas yang memastikan setiap orang dalam lembaga intelijen memiliki tanggung jawab pada bidang kerja tertentu.

Komunikasi dalam organisasi intelijen memiliki beberapa peran utama, yaitu:

1. Fungsi Informatif

Organisasi intelijen berfungsi sebagai sistem pengolahan informasi, di mana setiap anggota dapat mengakses informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Hal ini membantu anggota dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efisien (Choo, 2002).

2. Fungsi Regulatif

Fungsi ini berkaitan dengan penerapan aturan dalam organisasi intelijen. Terdapat dua hal yang mempengaruhi fungsi regulatif:

- a. Kewenangan pimpinan dalam mengatur aliran informasi dan memberikan instruksi.

- b. Pesan-pesan regulatif yang berfokus pada pelaksanaan tugas, memastikan kejelasan tentang apa yang diperbolehkan dan yang dilarang.

### 3. Fungsi Persuasif

Dalam mengelola organisasi intelijen, pimpinan kadang memilih pendekatan persuasif ketimbang perintah langsung. Pendekatan ini didasari pemahaman bahwa pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh anggota cenderung menciptakan keterlibatan yang lebih besar dibandingkan jika pimpinan sering menonjolkan kekuasaan dan otoritasnya (Cialdini, 2007).

#### **2.1.3 Potensi Gangguan atau Faktor Korelatif Kriminogen**

Potensi Gangguan (PG) merupakan fase awal dalam operasi intelijen yang ditandai dengan adanya perubahan atau dinamika di masyarakat. Aktivitas sehari-hari di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat menjadi sumber gangguan. Intelijen memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi perubahan ini dan memantau berbagai aliran yang muncul dalam kelompok masyarakat atau individu yang berpotensi mengancam keamanan nasional (Gill & Phythian, 2006).

Dari sudut pandang internal, intelijen berfungsi memberikan perkiraan situasi (Kirka) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Peran ini membantu dalam merancang program

jangka panjang, rencana strategis (Renstra) tahunan, serta program intelijen strategis yang berlangsung selama lima tahun.

Dari perspektif eksternal, intelijen menyediakan analisis mengenai bagaimana sebuah situasi dapat mempengaruhi berbagai dimensi. Dalam kasus terorisme, misalnya, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada aspek keamanan tradisional, tetapi juga mencakup dimensi kehidupan beragama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek lainnya (Ganor, 2011).

#### **2.1.4 Konsep Operasi Teritorial**

Menurut Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial TNI AD, Operasi Teritorial adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan militer dengan target, waktu, lokasi, dan dukungan logistik yang sudah ditentukan melalui perencanaan yang mendetail. Operasi ini bertujuan untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan berdasarkan perintah dan komando dari atasan yang berwenang, dalam rangka menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah (TNI AD, 2018).

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian disertasi ini:

Penelitian oleh Adhitya et al. (2021) berfokus pada "Sinergi Lembaga Intelijen dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia." Kajian ini mengevaluasi kolaborasi antara lembaga-lembaga intelijen dalam menangani ancaman siber dan efektivitasnya, dengan temuan bahwa

kolaborasi tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas yang lebih baik.

Gusti et al. (2019) mengkaji "Komunikasi Intelijen dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." Penelitian ini mengidentifikasi kendala serta strategi yang diterapkan dalam komunikasi intelijen untuk mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

Emil (2016) meneliti "Tantangan Intelijen dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia: Sebuah Perspektif." Studi ini mengulas tantangan yang dihadapi dalam kerjasama intelijen, baik antar-negara maupun dalam negeri, dalam menjalankan upaya kontra-terorisme di Indonesia.

Yusuf (2022) mengeksplorasi "Pendekatan Intelijen Strategis sebagai Upaya Perlindungan di Ruang Siber dalam Konteks Kebebasan Berekspresi." Penelitian ini menelaah ancaman kejahatan siber terkait kebebasan berekspresi dan peran pendekatan intelijen strategis dalam menangannya.

Boma dan Bastari (2023) mengadakan studi tentang "Peningkatan Kapabilitas Personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia." Penelitian ini berfokus pada usaha peningkatan keterampilan personel BAIS TNI dalam memperkuat sistem pertahanan negara.

Maulidyawanto et al. (2023) meneliti "Penanganan Radikalisme melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia." Studi ini membahas tentang radikalisme ekstrem

yang dapat memicu terorisme serta mengevaluasi program deradikalisasi sebagai pendekatan non-penal untuk mencegah radikalisme.

Naufal (2021) memaparkan "Upaya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung dalam Deteksi Dini untuk Mencegah Radikalisme di Provinsi Lampung." Penelitian ini mengulas strategi deteksi dini yang diterapkan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung dalam menekan penyebaran paham radikalisme di wilayah tersebut.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Teori Relasi Kekuasaan/Pengetahuan (Michel Foucault)**

Teori Relasi Kekuasaan/Pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault, sering disebut sebagai Teori Relasional, Teori Relasi Kekuasaan (power relations), Teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan (power/knowledge), atau Teori Genealogi/Arkeologi Pengetahuan, adalah salah satu teori kunci dalam tradisi poststrukturalisme (Foucault, 1980). Teori ini menekankan bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait dan membentuk satu sama lain dalam berbagai bentuk relasi sosial, menciptakan norma, aturan, dan praktik yang mempengaruhi masyarakat.

Foucault menggunakan istilah diskursus sebagai ideologi untuk menghindari pengertian ideologi dalam strateginya untuk menghindari pemahaman yang dikembangkan oleh Karl Marx. Foucault menganggap ideologi sebagai *false consciousness* atau kesadaran palsu. Foucault tidak sependapat dengan pemahaman ini karena menurutnya yang menggerakkan masyarakat sifatnya merupakan kesadaran.

Teori ini menekankan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan tidak hanya merupakan hasil dari kekuasaan, tetapi juga memproduksi kekuasaan. Foucault berpendapat bahwa diskursus-diskursus yang dominan dalam masyarakat mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada (Foucault, 1972).

Dalam ranah komunikasi intelijen, teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis cara di mana informasi dan pengetahuan yang dihasilkan oleh lembaga intelijen tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga turut membentuk realitas itu sendiri. Analisis diskursus kritis yang didasarkan pada teori Foucault dapat membantu mengungkap bagaimana diskursus-diskursus tertentu menjadi dominan dalam konteks keamanan nasional dan bagaimana hal ini mempengaruhi praktik-praktik intelijen (Fairclough, 2013).

### **2.3.2 Teori *Public Sphere* Habermas dalam Konteks Diskursus Publik Digital**

Pemikiran Jürgen Habermas tentang diskursus publik, yang didasarkan pada konsep tindakan komunikatif dan etika diskursus, mengalami transformasi signifikan dalam era digital. Transformasi ini menciptakan dinamika baru dalam cara masyarakat berkomunikasi dan berpartisipasi dalam ruang publik digital (Meisenbach, 2006; Glenna, 2008).

Dalam konteks digital, teori Habermas tentang situasi percakapan ideal menghadapi tantangan dan peluang baru. Platform digital

menyediakan ruang yang lebih luas untuk partisipasi beragam suara dalam diskursus publik, sejalan dengan prinsip inklusivitas yang diajukan Habermas. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Schäfer (2016), ruang digital juga dapat menciptakan fragmentasi narasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kolektif.

Konsep rasionalitas komunikatif Habermas mendapat dimensi baru dalam konteks post-modernisme dan post-humanisme. Jungherr dan Schroeder (2021) mengidentifikasi bahwa multiplikasi suara dalam platform digital dapat mengarah pada kurangnya koherensi dan rasionalitas dalam diskursus, yang menantang ideal demokrasi deliberatif yang diajukan Habermas. Teknologi digital sebagai mediator interaksi mengubah dinamika situasi percakapan ideal yang dibayangkan Habermas (Aune, 2007).

Aplikasi etika diskursus Habermas dalam konteks digital terlihat dalam praktik crowdsourcing dan komunikasi organisasi. Schlagwein et al. (2018) menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etika diskursus dapat diterapkan dalam menganalisis praktik crowdsourcing, dengan mempertimbangkan kesetaraan partisipasi dan potensi dominasi dalam diskursus digital. Hal ini merefleksikan pentingnya mempertahankan standar etis dalam komunikasi digital.

Tantangan utama penerapan teori Habermas dalam ruang digital adalah menjaga kualitas diskursus publik di tengah cepatnya penyebaran informasi dan potensi misinformasi. Polzer dan Goncharenko (2021) menggarisbawahi kompleksitas ini dalam konteks akuntabilitas dan

kepercayaan dalam komunikasi digital. Meskipun platform digital memperluas akses partisipasi, mereka juga dapat mendistorsi diskursus publik melalui bias algoritma dan kepentingan komersial ("Research on the Impact of Digitalization", 2023).

Dalam perkembangan kontemporer, aplikasi teori Habermas dapat dilihat dalam strategi organisasi seperti UN Women Australia (Yin, 2024), yang memanfaatkan platform digital untuk memperkuat dialog inklusif. Ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip diskursus etis Habermas dapat diadaptasi untuk mendorong perubahan sosial dan meningkatkan partisipasi demokratis dalam era digital.

Transformasi ruang publik digital menuntut pemahaman baru tentang bagaimana prinsip-prinsip diskursus Habermas dapat diterapkan untuk menjaga kualitas komunikasi publik (Salter, 2005). Meskipun teknologi digital membuka peluang baru untuk partisipasi demokratis, tetap penting untuk mempertahankan standar etis dan rasionalitas komunikatif yang menjadi inti pemikiran Habermas.

### **2.3.3 Teori Intelijen dan Kontra Intelijen dalam Konteks Operasi Teritorial**

Perkembangan wacana teoritis mengenai intelijen teritorial mencerminkan dinamika yang kompleks dalam menghadapi transformasi ancaman di era kontemporer. Matei & Bruneau (2011) mengemukakan bahwa paradigma teritorial telah bergeser dari konsepsi tradisional berbasis geografis menuju pendekatan multi-dimensional yang mencakup ruang

digital dan ideologis. Pandangan ini mendapat dukungan dari analisis Hendropriyono (2013) yang menekankan pentingnya fungsi penggalangan dalam mencegah meluasnya penyebaran kebencian di masyarakat melalui operasi intelijen teritorial.

Namun, perdebatan mengenai metodologi operasional menjadi semakin intensif ketika Cayford dan Pieters (2018) mengajukan argumen bahwa efektivitas intelijen modern sangat bergantung pada integrasi teknologi *surveillance* dengan kapabilitas analitis yang mendalam. Perspektif ini mendapat tantangan dari pandangan konvensional yang masih menekankan nilai interaksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Franz Magnis-Suseno (2006), ketegangan antara pendekatan teknologis dan humanis ini merefleksikan dilema yang lebih luas antara tuntutan efisiensi operasional dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Perdebatan semakin kompleks ketika menyentuh aspek koordinasi dan sinergitas antar lembaga. Donny Gahril Adian (2011) menggarisbawahi urgensi kerangka legal yang jelas untuk mengatur operasi intelijen teritorial, terutama dalam situasi kedaruratan. Argumen ini bersinggungan dengan perspektif yang dikemukakan oleh Giorgio Agamben dalam analisisnya tentang *state of exception*, yang menyoroti ketegangan antara legalitas formal dan kebutuhan operasional dalam situasi krisis.

Transformasi ancaman di era digital membawa dimensi baru dalam diskursus intelijen teritorial. Muqoddas (2010) mengidentifikasi bahwa praktik intelijen teritorial harus mampu mengantisipasi pergeseran pola ancaman dari yang bersifat fisik menjadi lebih abstrak dan ideologis. Pandangan ini mendapatkan elaborasi lebih lanjut dari As'ad Said Ali (2009) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dimensi sosiologis dan kultural dalam operasi intelijen teritorial.

Terkait dengan aspek demokratisasi, terjadi perdebatan menarik antara pendukung transparansi dan akuntabilitas dengan penekanan pada kerahasiaan operasional. Haryatmoko (2001) berargumen bahwa intelijen teritorial modern harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan kerahasiaan dengan tuntutan pengawasan demokratis. Pandangan ini mendapat tantangan dari perspektif yang lebih menekankan efektivitas operasional, sebagaimana tercermin dalam praktik-praktik intelijen tradisional.

Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan tersendiri dalam operasi intelijen teritorial. Generasi muda Indonesia semakin teralienasi dari pemahaman geografis dan kultural bangsanya sendiri, yang berimplikasi pada meningkatnya kerentanan terhadap infiltrasi ideologi asing. Fenomena ini menuntut adaptasi dalam pendekatan intelijen teritorial, sebagaimana diargumentasikan oleh Nurtjahjo (2006) yang menekankan pentingnya memahami dinamika sosial-politik kontemporer.

Sintesis dari berbagai perspektif ini mengarah pada pemahaman bahwa intelijen teritorial modern membutuhkan pendekatan yang lebih nuansir dan adaptif. Sebagaimana ditegaskan oleh Hendropriyono (2013), efektivitas operasi intelijen teritorial sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan berbagai dimensi - teknologi, sosial, kultural, dan legal - dalam kerangka yang koheren dan responsif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

Dinamika perdebatan dalam teori intelijen teritorial semakin kompleks ketika menyentuh aspek operasional dan etis. Wijayanto (2006) mengembangkan konsep "Velox et Exactus" yang menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam operasi intelijen teritorial. Namun, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem demokrasi modern.

Diskursus tentang efektivitas intelijen teritorial dalam menghadapi ancaman asimetris mendapat perhatian khusus dari Latif (2011) yang menyoroti peran negara kesejahteraan dalam konteks keamanan. Argumentasi ini diperkuat oleh Suseno (2006) yang mengidentifikasi karakteristik fundamentalisme sebagai bentuk modernitas terbalik yang menuntut pendekatan intelijen yang lebih sophisticated.

Dalam konteks koordinasi antar lembaga, Cahyono (2008) mengkritisi minimnya peran negara dalam resolusi konflik di beberapa wilayah Indonesia. Kritik ini mendapat tanggapan dari perspektif yang dikemukakan oleh Lasiyo (2008) tentang pentingnya memahami budaya

lokal dalam operasi intelijen teritorial, yang tercermin dalam konsep "muakhi" pada komunitas adat.

Dimensi baru muncul ketika Nasution (1953) mengemukakan teori tentang pentingnya membangun jejaring dan menguasai musuh dalam operasi intelijen. Teori ini mendapat elaborasi kontemporer dari Purnomo (2009) yang menganalisis argumentasi teologis-sosial dalam radikalisme, menuntut adaptasi dalam pendekatan intelijen teritorial.

Terkait aspek legal-formal, perdebatan menarik muncul antara perspektif Adian (2011) tentang teori kedaruratan dengan pandangan Agamben (2005) mengenai state of exception. Kontestasi ini merefleksikan ketegangan antara kebutuhan operasional dan tuntutan legal dalam pelaksanaan intelijen teritorial.

Transformasi paradigma teritorial dalam teori intelijen tidak dapat dilepaskan dari aspek defensif yang diwujudkan dalam bentuk kontra intelijen. Pergeseran sifat ancaman dari yang konvensional menuju bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan asimetris menuntut pengembangan kapabilitas kontra intelijen yang lebih adaptif. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat posisi strategis Indonesia yang kerap menjadi sasaran operasi intelijen asing dengan berbagai bentuk dan metodenya. Dalam konteks ini, teori kontra intelijen memberikan kerangka konseptual yang penting dalam memahami dan menghadapi dinamika ancaman kontemporer.

Diskursus mengenai kontra intelijen dalam konteks teritorial membawa dimensi penting dalam teori intelijen modern. Berdasarkan dokumen yang diberikan, Hendropriyono (2013) mendefinisikan kontra intelijen sebagai "kegiatan pengamanan yang dilakukan secara aktif, yaitu melakukan kegiatan lawan intelijen (contra intelligence), misalnya melakukan survei tentang kemungkinan lawan mengetahui keadaan kita." Perspektif ini mendapat penguatan dari Matei & Bruneau (2011) yang menekankan bahwa kontra intelijen merupakan elemen vital dalam melindungi kepentingan nasional dari infiltrasi intelijen asing.

Namun, terjadi perdebatan menarik ketika konsep kontra intelijen dihadapkan dengan realitas ancaman asimetris. Dalam dokumen disebutkan bahwa "operasi kontra-intelijen (counter intelligence) merupakan langkah guna mencegah meningkatnya potensi ancaman menjadi kekuatan nyata, yang dapat memporak-porandakan stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat kita" (Hendropriyono, 2013). Pandangan ini menunjukkan pergeseran fokus kontra intelijen dari yang semula berorientasi pada ancaman eksternal konvensional menuju ancaman yang lebih kompleks dan multidimensional.

Konteks kontra intelijen dalam operasi teritorial menjadi semakin relevan mengingat, sebagaimana dicatat dalam dokumen, "Indonesia sepanjang sejarahnya, kerap menjadi objek atau sasaran praktik intelijen hitam dari pemerintah negara asing" (Hendropriyono, 2013). Realitas ini

menuntut pengembangan kapabilitas kontra intelijen yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif.

Elaborasi lebih lanjut tentang kontra intelijen dalam konteks teritorial menunjukkan kompleksitas yang menarik. Adian (2011) berargumen bahwa aktivitas kontra intelijen harus mempertimbangkan kondisi "kedaruratan" yang dapat memunculkan tindakan-tindakan di luar kerangka hukum normal. Argumentasi ini bersinggungan dengan pandangan Agamben (2005) tentang state of exception, di mana operasi kontra intelijen sering kali harus beroperasi dalam "ruang hampa hukum".

Dalam konteks operasional, dokumen mengungkapkan bahwa kontra intelijen teritorial menghadapi tantangan dalam bentuk "intelijen hitam" yang beroperasi melalui berbagai metode - putih, kelabu, dan hitam (Hendropriyono, 2013). Matei & Bruneau (2011) memperkuat argumen ini dengan mengidentifikasi bahwa efektivitas kontra intelijen sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan berbagai pendekatan, dari yang terbuka hingga tertutup.

Aspek yang tidak kalah penting adalah dimensi pengamanan informasi dalam kontra intelijen. Sebagaimana dicatat Wijayanto (2006), prinsip "Velox et Exactus" dalam kontra intelijen harus diimbangi dengan sistem pengamanan yang ketat terhadap kebocoran informasi. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya kebocoran data secara masif.

Franz Magnis-Suseno (2006) memberikan perspektif etis yang menarik dengan menekankan bahwa operasi kontra intelijen, meskipun bersifat rahasia, tetap harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas. Pandangan ini mendapat tantangan dari perspektif yang lebih menekankan efektivitas operasional, sebagaimana tercermin dalam praktik-praktik kontra intelijen tradisional.

Terkait dengan ancaman kontemporer, Purnomo (2009) mengidentifikasi bahwa kontra intelijen teritorial harus mampu mengantisipasi infiltrasi ideologis yang semakin canggih. Hal ini sejalan dengan observasi tentang meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap pengaruh asing yang dapat mengancam ketahanan nasional.

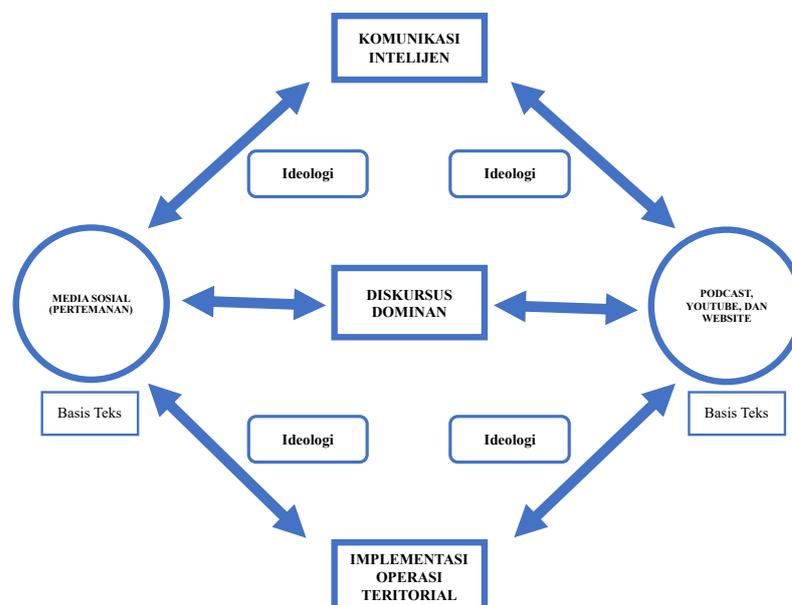
Dalam aspek koordinasi, Cahyono (2008) menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam operasi kontra intelijen teritorial. Namun, As'ad Said Ali (2009) mengingatkan bahwa koordinasi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip *need to know* untuk menjaga kerahasiaan operasi.

Berdasarkan berbagai perspektif dan perdebatan yang telah dipaparkan, teori intelijen dan kontra intelijen teritorial terus mengalami evolusi seiring dengan kompleksitas tantangan kontemporer. Perbedaan pandangan antara pendekatan tradisional yang menekankan interaksi langsung dengan masyarakat, dan tuntutan modernisasi yang mengedepankan integrasi teknologi, telah membentuk diskursus yang kaya dalam pengembangan teori intelijen teritorial. Meskipun terdapat ketegangan antara tuntutan efektivitas operasional dan prinsip-prinsip

demokratis, sintesis berbagai perspektif mengarah pada pemahaman bahwa intelijen teritorial modern membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Integrasi dimensi teknologi, sosial, kultural, dan legal dalam kerangka operasional yang koheren menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks. Sebagaimana ditegaskan Hendropriyono (2013), keberhasilan intelijen teritorial di era modern tidak hanya bergantung pada kapabilitas teknis, tetapi juga pada kemampuan memahami dan merespons dinamika sosial-politik secara tepat dan bertanggung jawab.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian literatur dan teori yang telah dijelaskan, berikut disajikan kerangka konseptual dari penelitian ini:



**Gambar 3.** Kerangka Konseptual Penelitian, Sumber: Olahan Peneliti

Dari Kerangka Konseptual di atas tergambar bahwa 'diskursus ancaman terhadap negara' dapat dianalisis berdasarkan teksnya yang dalam penelitian ini dianggap sebagai basis teks, yang juga berkaitan dengan proses produksi teks yang nantinya memberikan jawaban terhadap mengapa teks itu eksis dan mengemuka dalam pembicaraan masyarakat, yang dalam penelitian ini diasumsikan sangat terkait dengan konteks lahirnya diskursus yang berkembang di masyarakat tersebut.

Dengan demikian aspek kesejarahan (*historical context*), sosial, politik, perundang-undangan dan budaya merupakan elemen-elemen penting yang juga akan menjadi latar mengapa suatu diskursus eksis dan dapat berkembang di masyarakat di setiap kanal-kanal tersebut. Untuk mengetahui semua elemen ini, sesuai kerangka konseptual, maka semua kanal-kanal Komunikasi sebagai basis data (basis analisis diskursus) membentuk formasi diskursus dominan mengenai ancaman terhadap negara (diskursus infiltrasi).

Tahapan analisis bersifat induktif resiprokal, yakni pemahaman berdasarkan elemen-elemen tak penting pada pemahaman diskursus dominan, atau bersifat deduktif resiprokal yang dimulai dari penemuan diskursus dominan untuk mengetahui apa yang dianggap benar dan menggerakkan di tengah masyarakat yang bersifat ideologi dan teks yang menggerakkan (*text driven*). Dengan demikian diskursif infiltrasi yang berpotensi mengancam negara pada tahapan pertama dianalisis secara

terperinci berdasarkan apa yang termaktub secara manifes diskursif (*manifest discursive*) di setiap kanal komunikasi tersebut.

Dalam penelitian ini kanal youtube/podcast yang dianggap sebagai kanal dominan yang memiliki keterkaitan dan pengaruh dalam pembentukan diskursus mengenai ancaman terhadap negara yang berkembang dan menjadi pembicaraan di masyarakat. Kanal-kanal lain yang juga mendukung seperti media sosial masih memiliki keterkaitan antar kanal yang ditemukan kontruksi diskursus dan distribusi pesan yang mengarah pada ancaman terhadap negara.